

PENGARUH *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI BISMA TERHADAP EFISIENSI BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nanda Khoerunnisa,
Arifah Rosmayudi., Ade Iskandar
Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
Email nandakhoerunnisa0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh E-Government Melalui Aplikasi Bisma Terhadap Efisiensi Barang Milik Daerah Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya”. Yang menjadi pokok permasalahan yaitu: Data yang tercatat dalam aplikasi BISMA seringkali tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, menghambat proses pengelolaan aset secara optimal, Seringnya pergantian operator aplikasi BISMA berdampak pada kurangnya konsistensi dalam pengoperasian sistem, mengakibatkan kesalahan dalam penginputan dan pelaporan data, Anggaran dan perhatian terhadap pemeliharaan BMD sering kali terbatas, menyebabkan penurunan kualitas dan umur aset lebih cepat dari seharusnya. Dari sisi *egovernment*, Aplikasi BISMA masih memerlukan penyempurnaan karena terdapat beberapa fitur yang belum berfungsi secara optimal, menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi aset daerah, Kurangnya evaluasi berkala terhadap penggunaan aplikasi BISMA membuat permasalahan teknis tidak segera terdeteksi dan diselesaikan, memperlambat peningkatan efisiensi. Teori tentang E-Government oleh Mohhamed Ateeq Alanezi, Ahmed Kamil, dan Shuib Basri digunakan sebagai kerangka pemikiran. Dalam teori ini, dimensinya adalah Kemudahan Penggunaan (kemudahan penggunaan), Kepercayaan (kepercayaan), Fungsionalitas Interaksi Lingkungan (fungsionalitas interaksi lingkungan), Keandalan (keandalan), Isi dan Penampilan Informasi (isi dan penampilan informasi), dan Dukungan Masyarakat (pendukung). Namun, untuk efisiensi barang milik daerah, teori Belo et al. digunakan. Dalam teori ini, elemen-elemen yang digunakan termasuk aspek fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil uji perhitungan e-government yang dilakukan melalui aplikasi BISMA menunjukkan bahwa Efisiensi Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya meningkat. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,466 menunjukkan bahwa variabel Egovernment memengaruhi variabel Efisiensi Barang Milik Daerah (BMD) sebesar 46,6%, dan variabel lain memengaruhi 53,4%.

Kata Kunci: *Egovernment*, Efisiensi Barang Milik Daerah.

PENDAHULUAN

Dengan otonomi, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kemajuan dan kesejahteraan warganya. Pemerintah menghadapi sejumlah masalah saat menjalankan tanggung jawabnya. Salah satunya adalah sistem kerja yang digunakannya saat ini, yang didasarkan pada birokrasi yang kaku. Karena prosesnya yang panjang, rumit, dan rumit, lembaga negara, masyarakat, dan dunia usaha terlibat dalam interaksi yang kompleks dengan pemerintah.

Oleh karena itu, pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan bersama, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah, dan meningkatkan efektivitas kerja pemerintah menjadi sangat penting dan memerlukan perhatian pemerintah. Perubahan yang harus

dilakukan termasuk membangun sistem informasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintah. Sistem informasi di instansi pemerintah membuat masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang kegiatan pelayanan pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Ini mendorong penerapan e-government, yang merupakan sistem yang menggunakan teknologi informasi pemerintah.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik untuk meningkatkan operasi dan penyediaan layanan dikenal sebagai sistem e-government (Alfeno et al., 2022). Menurut Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003, sistem e-government akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Setiap entitas pemerintahan diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk menerapkan sistem e-government. E-government adalah ketika pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada warganya, perusahaan, dan hal lain yang berkaitan dengan pemerintah.

E-government di Pemerintah Kota Tasikmalaya dibagi menjadi dua kategori: pertama adalah e-government untuk pengelolaan keuangan daerah dan kedua adalah e-government untuk pelayanan masyarakat. Untuk pengelolaan keuangan daerah, e-budgeting, e-proyek, e-procurement, e-delivery, e-controlling, dan e-performance adalah contohnya. Untuk pelayanan masyarakat, e-sapawarga mencakup e-perizinan, e-musrenbang, dan e-pengaduan. Dengan demikian, pemerintah menyadari pentingnya bekerja secara elektronik dan mulai menerapkan pemerintahan elektronik. Tujuan dari penerapan pemerintahan elektronik adalah untuk menurunkan biaya proses administrasi dan meningkatkan efisiensi dan kinerja pemerintah. Salah satu inovasi Tim Aset BPKAD adalah peluncuran aplikasi Barcode Information System Mobile (BISMA) yang berbasis web dan Android. Aplikasi ini diluncurkan oleh BPKAD dan dapat diakses di playstore (BPKAD Kota Tasikmalaya, 2024).

Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), aplikasi BISMA diluncurkan pada tahun 2021. Tim Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya menggunakan inovasi teknologi terbaru untuk mempermudah inventarisasi BMD. Pengurus barang pengguna di seluruh SKPD, termasuk di dalamnya kecamatan se-Kota Tasikmalaya, dapat melakukan inventarisasi BMD dengan mudah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa pengelolaan BMD harus dilakukan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya meluncurkan aplikasi BISMA untuk digunakan secara elektronik.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi barang milik daerah (BMD) memastikan bahwa aset milik pemerintah daerah digunakan secara efektif, ekonomis, dan sesuai dengan tujuan pelayanan publik. Ini dicapai melalui pengelolaan BMD yang efektif, yang mencakup perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penghapusan aset yang tidak menghasilkan hasil.

Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan, meningkatkan nilai guna aset, dan mendukung sistem keuangan daerah yang jelas dan akuntabel. Peraturan terkait, seperti Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur penggunaan efisiensi ini.

Tujuan dari penerapan e-government melalui aplikasi BISMA di BPKAD Kota Tasikmalaya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BMD. Namun demikian, berbagai masalah terus menghalangi penggunaan aplikasi ini untuk optimalisasi sistem. Karena kendala teknis dan non-teknis, efisiensi yang diharapkan tidak tercapai sepenuhnya. Akibatnya, proses inventarisasi dan pelaporan aset di daerah menjadi kurang akurat dan memakan waktu lebih lama.

Di situs web Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, peneliti menemukan bahwa efisiensi barang milik daerah belum sepenuhnya memuaskan. Contoh berikut menunjukkan hal ini.

1. Data yang tercatat dalam aplikasi BISMA seringkali tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, menghambat proses pengelolaan aset secara optimal.
2. Seringnya pergantian operator aplikasi BISMA berdampak pada kurangnya konsistensi dalam pengoperasian sistem, mengakibatkan kesalahan dalam penginputan dan pelaporan data.
3. Anggaran dan perhatian terhadap pemeliharaan BMD sering kali terbatas, menyebabkan penurunan kualitas dan umur aset lebih cepat dari seharusnya.

Peneliti menduga bahwa implementasi e-government yang kurang efektif menyebabkan masalah tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh fenomena e-government, terutama aplikasi BISMA, sebagai berikut.

1. Aplikasi BISMA masih memerlukan penyempurnaan karena terdapat beberapa fitur yang belum berfungsi secara optimal, menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi aset daerah.
2. Kurangnya evaluasi berkala terhadap penggunaan aplikasi BISMA membuat permasalahan teknis tidak segera terdeteksi dan diselesaikan, memperlambat peningkatan efisiensi.

Peneliti memutuskan bahwa, berdasarkan penjelasan dan tanda-tanda masalah di atas, ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana menggunakan e-government untuk meningkatkan efektivitas barang milik daerah. Dengan demikian, penelitian dengan judul "Pengaruh E-government Melalui Aplikasi BISMA Terhadap Efisiensi Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Aset Dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya" adalah subjek minat penulis.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menyusun laporan penelitian ini, saya memilih judul "Pengaruh E-Government terhadap Efisiensi Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya". Saya juga menggunakan kerangka pikir yang dapat dijadikan landasan teori dan meminta pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan fokus dan lokus penelitian. Variabel penelitian ini adalah E-Government (variabel bebas) dan Efisiensi Barang Milik Daerah

Peneliti akan mendefinisikan "E-Government" sebagai "upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik" (Suaedi & Wardiyanto, 2010).

Sehingga tujuan organisasi dapat dicapai, penerapan e-government harus dilakukan dengan benar dan efisien. Menurut Mohhamed Ateeq Alanezi, Ahmed Kamil, dan Shuib Basri (2010), e-government didefinisikan sebagai sejauh mana situs web e-government dapat membantu dalam memberikan layanan yang berkualitas tinggi untuk membantu masyarakat, bisnis, dan lembaga dalam menjalankan pemerintahan. Enam dimensi e-government terdiri dari enam kriteria utama. Ini termasuk

1. Kemudahan Penggunaan (kemudahan Penggunaan): Kemudahan e-government untuk berinteraksi dengan masyarakat.
2. Kepercayaan: Kepercayaan masyarakat terhadap e-government mengenai kebebasan dari risiko bahaya atau keraguan selama proses layanan online.
3. Fungsionalitas Interaksi Lingkungan (Fungsionalitas Interaksi Lingkungan): Fungsi penting dari e-government yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dan mengumpulkan informasi yang diperlukan.
4. Kemampuan (keandalan): sebagai kepercayaan publik terhadap e-government tentang layanan pengiriman yang tepat waktu dan akurat. Istilah ini mencakup fungsi teknis yang tepat, seperti aksesibilitas dan ketersediaan, serta layanan yang sangat akurat.
5. Isi dan Tampilan Informasi (isi dan tampilan informasi): Kepercayaan masyarakat akan kualitas informasi dan penyajiannya, seperti penggunaan warna, grafis, dan ukuran halaman web yang tepat.
6. Dukungan Masyarakat (pendukung): Dukungan pemerintah yang membantu orang mencari informasi..

Selanjutnya, dia berbicara tentang efisiensi barang milik daerah (BMD), yang seharusnya menjadi ukuran seberapa baik suatu organisasi mencapai tujuan. Kondisi yang dicapai seseorang atau organisasi saat menjalankan sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu disebut efisiensi. "Efisiensi barang milik daerah (BMD) adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola aset secara optimal, efektif, dan ekonomis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat" (Mardiasmo, 2018).

Menurut Sholeh dan Rochmansjah dalam (Belo et al., 2018), prinsip-prinsip berikut harus dipatuhi agar pelaksanaan pengelolaan aset daerah dapat dilakukan dengan baik dan benar untuk mencapai efisiensi dan efektivitas:

1. Azas fungsional: Pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang, dan kepala daerah sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab mereka masing-masing.
2. Azas kepastian hukum: Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Azas transparansi: Pengelolaan barang milik daerah harus transparan.
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus menggunakan barang milik daerah sesuai dengan standar kebutuhan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh ketepatan nilai yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang milik daerah.

Oleh karena itu, hubungan antara egoisme dan efisiensi barang milik daerah (BMD) sangat penting, seperti yang digariskan oleh Presiden. E-government diperlukan untuk menanggapi perubahan lingkungan strategis yang menuntut administrasi negara yang efisien, efektif, terbuka, transparan, dan akuntabel (Habibullah & Ferawati, 2022). Peningkatan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas yang lebih baik ke pelayanan publik adalah keuntungan yang paling diantisipasi dari e-government. Pemerintahan elektronik memainkan peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode asosiatif—sebuah pendekatan kuantitatif—untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel dengan menguji hipotesis. Menurut Sugiyono (2018), definisi asosiatif adalah sebagai berikut: penelitian yang menyelidiki pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih.

Dua variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel adalah objek penelitian (Sumardi Suryabrata, 2014). Selain itu, variabel dapat didefinisikan sebagai variabel yang mempengaruhi peristiwa atau gejala yang akan diteliti.

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi efek dari dua variabel: e-government sebagai variabel bebas (variabel independen) dan efisiensi kerja sebagai variabel terikat (variabel dependen).

Menurut Sugiyono (2018), variabel terikat atau dependent variabel adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti dan dipengaruhi oleh faktor lain. Sebaliknya, variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang keragamannya disebabkan oleh campur tangan peneliti atau kondisi yang ingin diteliti, diteliti, atau dipelajari, dan mempengaruhi variabel terikat.

Penelitian ini melibatkan 39 Operator BISMA dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, yang merupakan seluruh Pegawai PNS.

Data diambil dari sebagian populasi. Menurut Sugiyono (2018), penelitian ini menggunakan sampling jenuh untuk mengambil sampel. Teknik ini digunakan dalam kasus di mana setiap anggota populasi diambil sebagai sampel, atau ketika penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Sensus, di mana populasi digunakan sebagai sampel, adalah istilah tambahan untuk sampel jenuh.

Menurut temuan penelitian ini, semua Operator BISMA di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, yang berjumlah 39 orang.

A. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada operator BISMA di bawah tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan analisis regresi linier sederhana. Menurut pendapat Sugiyono (2018), analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Hasil regresi digunakan untuk membuat keputusan tentang apakah peningkatan variabel independen (E-Government) dapat meningkatkan variabel dependen (Efisiensi Barang Milik Daerah) atau tidak. Sebagai contoh, persamaan analisis regresi sederhana dapat dirumuskan.

$$Y = a + bX + e$$

Dimana :

Y = Efisiensi Barang Milik Daerah

a = Nilai Y bila X = 0 (Nilai konstanta)

b = Arah koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.

X = *E-Government*

e = Tingkat Kesalahan (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner. Untuk menguji validitasnya, peneliti mengajukan angket kepada 39 operator BISMA dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya.

Tabel berikut menunjukkan temuan uji validitas penelitian.

Tabel 1, Nilai Uji Validitas Variabel *E-Government* (X)

No.	r hitung	r tabel pada N = 30	Keterangan
1	0,485	0,316	VALID
2	0,515	0,316	VALID
3	0,742	0,316	VALID
4	0,635	0,316	VALID
5	0,843	0,316	VALID
6	0,758	0,316	VALID
7	0,700	0,316	VALID
8	0,823	0,316	VALID
9	0,652	0,316	VALID
10	0,661	0,316	VALID
11	0,758	0,316	VALID
12	0,669	0,316	VALID

Sumber: Data Di Olah, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) pertanyaan yang diuji validitas variabel E-Government (X1), setiap pertanyaan dinyatakan valid. Ini menunjukkan bahwa 12 (dua belas) pertanyaan untuk variabel E-Government (X1) layak untuk digunakan dalam penelitian. Dengan tingkat signifikansi 5%, pertanyaan tersebut dinyatakan valid karena nilai koefisien korelasinya lebih besar dari nilai r tabel, yaitu 0,316.

Tabel 2. Nilai Uji Validitas Variabel Efisien Barang Milik Daerah (Y)

No.	r hitung	r tabel pada N = 39	Keterangan
1	0,759	0,316	VALID
2	0,657	0,316	VALID
3	0,863	0,316	VALID
4	0,747	0,316	VALID
5	0,705	0,316	VALID

6	0,845	0,316	VALID
7	0,622	0,316	VALID
8	0,667	0,316	VALID
9	0,734	0,316	VALID
10	0,546	0,316	VALID
11	0,456	0,316	VALID
12	0,677	0,316	VALID

Sumber: Data Di Olah, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa 12 (dua belas) pertanyaan yang diuji validitas variabel Efisiensi Barang Milik Daerah (Y) digunakan. sebagai instrumen untuk penelitian. Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dibagi menjadi dua kategori: uji reliabilitas masalah variabel X dan uji reliabilitas masalah variabel Y. Nilai koefisien korelasinya lebih tinggi dari nilai r tabel, yaitu 0,316, dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 3. Nilai Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
E-Government	0,905	0,60	Reliabel
Efisiensi Barang Milik Daerah	0,895	0,60	Reliabel

Sumber: Data di Olah, 2025

Menurut Tabel 3, instrumen yang digunakan dapat diandalkan karena nilai reliabilitas variabel yang dihitung menggunakan rumus Alpha Cronbach adalah rhitung > 0,60.

Mengetahui pengaruh e-government, maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan Aplikasi BISMA terhadap Efisiensi Aset Daerah di BPKAD Kota Tasikmalaya. Gagasan yang diajukan adalah "Besarnya pengaruh E-government melalui Aplikasi BISMA terhadap Efisiensi Aset Daerah di BPKAD Kota Tasikmalaya, dipengaruhi oleh Ease of Use (kemudahan penggunaan), Trust (kepercayaan), Functionality of the Interaction Environment (fungsionalitas interaksi lingkungan), Reability (keandalan), Content and Appearance of Information (isi dan tampilan informasi), dan Citizen Support (dukungan)". Uji t digunakan untuk pengujian hipotesis, dan SPSS versi 26.0 digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh E-government melalui Aplikasi BISMA (X) terhadap Efisiensi Aset Daerah (Y).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penulis menggunakan analisis regresi linier dasar untuk melakukan analisis statistik guna mengetahui dampak e-government melalui aplikasi BISMA terhadap efektivitas aset daerah. Efisiensi aset daerah merupakan variabel dependen (Y) dan e-government melalui program BISMA merupakan variabel independen (X) dalam analisis statistik ini.

Hasil perhitungan data sebelumnya menunjukkan persamaan regresi berikut:

$$\hat{Y} = 0,242 + 0,990X$$

Berdasarkan persamaan tersebut, Efisiensi Aset Daerah adalah 0,242 karena nilai konstanta a = 0,242 menunjukkan bahwa E-Government Melalui Aplikasi BISMA sama dengan 0 (nol). Namun, berdasarkan nilai koefisien regresi b = 0,990, Efisiensi Aset Daerah akan meningkat sebesar 0,990 untuk setiap penambahan 1 (satu) unit E-Government yang menggunakan Aplikasi BISMA. Efisiensi aset daerah dan e-government melalui aplikasi BISMA keduanya berkontribusi positif, sebagaimana terlihat dari koefisien regresi yang positif.

Metode analisis regresi, koefisien korelasi untuk mengetahui hubungan, dan koefisien determinasi untuk mengetahui pengaruh antar variabel digunakan dalam analisis data penelitian ini. Nilai R sebesar 0,991 ditentukan menggunakan perhitungan SPSS (tabel ringkasan model terlampir). Nilai ini, yang berada di antara 0,80 dan 1,00, menunjukkan adanya hubungan antara efisiensi properti daerah dan e-government melalui aplikasi BISMA. Tingkat kedekatannya termasuk dalam kategori sangat kuat. Karena peningkatan E-government melalui aplikasi BISMA diikuti dengan peningkatan

efisiensi properti daerah, hal ini menyiratkan bahwa jika E-government melalui aplikasi BISMA meningkat, maka efisiensi properti daerah juga akan meningkat.

Penerapan e-government melalui aplikasi BISMA oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi aset daerah. Hasil perhitungan SPSS Versi 26 juga menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,983 atau 98,3%. Hal ini menunjukkan bahwa aset daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya akan beroperasi lebih efisien jika e-government yang efektif diterapkan menggunakan aplikasi BISMA. Variabel lain (faktor residual) memiliki dampak sebesar 1,7% terhadap efisiensi aset daerah melalui aplikasi BISMA, selain e-government. Ini berarti bahwa setiap peningkatan E-Government Melalui Aplikasi BISMA akan menghasilkan peningkatan efisiensi barang milik daerah sebesar 98,3 persen, dengan 1,7% yang tersisa dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak termasuk dalam E-Government Melalui Aplikasi BISMA.

Dengan tingkat kesalahan 0,05, perhitungan SPSS menghasilkan nilai t sebesar 45,600, nilai t tabel sebesar 2,024, dan nilai P sebesar 0,000. Berdasarkan kriteria penolakan H_0 , jika t hitung $>$ t tabel, nilai $t = 45,600$, nilai t tabel = 2,024, dan nilai $P < \alpha$ atau $0,000 < 0,05$, maka aturan pengambilan keputusan adalah menerima H_a atau menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-Government Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya melalui Aplikasi BISMA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi aset daerah.

Berdasarkan temuan studi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam efektivitas Pengelolaan Aset Daerah (BMD) berkat penerapan E-Government melalui aplikasi BISMA (Sistem Manajemen Aset Daerah). Untuk mengurangi kesalahan manual, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, aplikasi BISMA dapat mempercepat proses pendaftaran, pemantauan, dan pelaporan aset daerah secara tepat dan transparan.

Hal ini sejalan dengan gagasan e-government yang dikemukakan oleh Heeks (2006), yang menyatakan bahwa tujuan pemanfaatan TI dalam pemerintahan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik, termasuk pengelolaan aset. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan pengelolaan aset berdasarkan konsep akuntabilitas, transparansi, dan pemantauan waktu nyata (real-time) dengan memanfaatkan platform digital seperti BISMA. Hal ini mendukung klaim Moon (2002) bahwa e-government mempercepat layanan dan meningkatkan efektivitas operasional organisasi sektor publik. Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Pratama dan Nugroho (2021), yang menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan aset pemerintah meningkat pesat melalui penerapan sistem informasi aset berbasis e-government. Penerapan aplikasi aset berbasis TI meningkatkan kecepatan dan akurasi data aset, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan aset negara atau daerah, menurut temuan serupa yang dilaporkan oleh Yuliani dan Handayani (2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi dan pembahasan mengenai dampak e-government melalui aplikasi BISMA terhadap efektivitas aset daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, berikut ini kesimpulan yang dapat ditarik. Efisiensi aset daerah dan e-government di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya dengan menggunakan aplikasi BISMA berada dalam kategori Baik. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa Efisiensi Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya sebesar 98,3% dipengaruhi oleh E-Government melalui aplikasi BISMA, sedangkan sisanya sebesar 1,7% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak terkait dengan E-Government melalui aplikasi BISMA.

DAFTAR PUSTAKA

Alfeno, S., Kumar, A., & Saleh, A. F. R. (2022). Rancang Bangun (SISMAKAR) Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar Berbasis Web. *Journal CERITA*, 8(1).

<https://doi.org/10.33050/cerita.v8i1.2140>

- Belo, B. R., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. C. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Opd Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2). https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i2.7
- Habibullah, A., & Ferawati, D. (2022). Government To Employes: Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Online Kepegawaian (Sinok) Dalam Mengukur Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Pemerintahan Kota Tegal. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 10(2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i2.8013>
- Indrajit, R. E. (2006). Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. *E- Government*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru - Google Play Buku. In *ANDI Yogyakarta*.
- Pasolong. (2019). Teori Admnistrasi Publik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1).
- Pekei, B. (2019). Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah di Era Otonomi: Teori, Konsep, dan Analisis. In *Jakarta: Tausbia*.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Samuel, C. A. (2021). Capaian, Peluang, dan Tantangan Implementasi E-Government di Indonesia. *Center For Digital Society*.
- Singarimbun, M. (2006). sofan Effendi. In *Metode Penelitian Survei*.
- Suaedi, F., & Wardiyanto, B. (2010). Revitalisasi administrasi negara: reformasi birokrasi dan e-governance. *Yogyakarta: Graba Ilmu*, 24(01).
- Sudjana. (2005). sudjana. In *Metoda statistika*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penciltian Kuantitatif, Kualitatif Kombinasi dan R&D. In *Alfabeta Bandung*.
- Sumardi Suryabrata. (2014). Metode penelitian. *Metode Penelitian*.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218->